



LAPORAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI

TRIWULAN III TAHUN 2021

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS 1B



Jl. Depati Said No.1 Kelurahan Tapak Lebar
Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Kota Lubuk Linggau 31616



(0733) 321570



pn-lubuklinggau.go.id



pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

LEMBAR PENGESAHAN

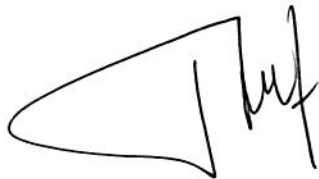
**LAPORAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
DI PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS IB
TRIWULAN III TAHUN 2021**

**Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019**

Disahkan di Lubuklinggau
Pada Hari Senin, 11 Oktober 2021

Management Representative,

Ketua Tim Survei,



TRI LESTARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172009042009



DEDY SOHAIDI, S.H., M.H.
NIP. 198507082006041001

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU



IMAM SANTOSO, S.H.
NIP. 197604171999031002


KATA PENGANTAR

Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IB merupakan instansi yang bertugas melayani masyarakat pencari keadilan. Pelayanan kepada masyarakat tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat puas dengan pelayanan pengadilan. Untuk mendapatkan informasi tentang tingkat persepsi korupsi, Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IB mengadakan survei persepsi korupsi. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Korupsi yang dapat diartikan bahwa seberapa puas masyarakat atas layanan yang bersih tanpa adanya tendensi tertentu yang dapat dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini meminta pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IB yang diambil dengan kuesioner melalui Aplikasi SISUPER.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB Lubuklinggau dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Kelas IB Lubuklinggau.

Lubuklinggau, 11 Oktober 2021



Tim Survei

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan Pelaksanaan	7
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil Responden	9
3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator	12
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan ...	21
3.4. Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	23
BAB IV PENUTUP	25
4.1. Kesimpulan	25
4.2. Rekomendasi	25

DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>		<i>Halaman</i>
1.	Mode Alur Penyusunan Survei IPK menuju Zona Integritas.....	7
2.	Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi	7
3.	Nilai Persepsi.....	8
4.	Tingkat Pendidikan Responden	9
5.	Jenis Pekerjaan Responden.....	10
6.	Domisili Responden	10
7.	Usia Responden	11
8.	Jenis Kelamin Responden	11
9.	Jenis Layanan yang dipergunakan Responden	11
10.	Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan	12
11.	Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	13
12.	Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh	14
13.	Indeks pada Indikator Transaksi Biaya	15
14.	Indeks pada Indikator Biaya Tambahan.....	16
15.	Indeks pada Indikator Hadiah	17
16.	Indeks pada Indikator Transparansi Biaya	18
17.	Indeks pada Indikator Percaloan	19
18.	Indeks pada Indikator Perbuatan Curang.....	20
19.	Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia.....	21
20.	Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B.....	22
21.	Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B	22
22.	Skor dan Peringkat Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B Triwulan III Tahun 2021.....	23
23.	Isian Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B.....	24

DAFTAR GAMBAR

<i>No. Gambar</i>		<i>Halaman</i>
1.	Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan	12
2.	Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	13
3.	Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh	14
4.	Indeks pada Indikator Transaksi Biaya	15
5.	Indeks pada Indikator Biaya Tambahan	16
6.	Indeks pada Indikator Hadiah	17
7.	Indeks pada Indikator Transparansi Biaya	18
8.	Indeks pada Indikator Percaloan	19
9.	Indeks pada Indikator Perbuatan Curang.....	20
10.	Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai

diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IB ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Aplikasi Survei SISUPER
 - c. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - d. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per triwulan (1 Juli 2021 s.d 30 September 2021). Survei ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IB. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IB.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IB.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

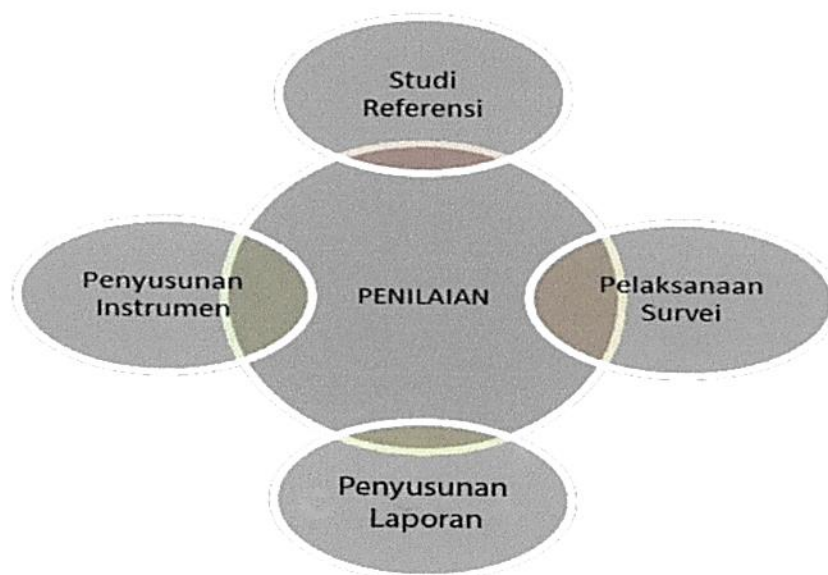
Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1

Model Alur Penyusunan Survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi

No.	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan, memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau mayoritas memiliki latar belakang pendidikan S1 sebanyak 121 orang dengan persentase sebesar 51,93%.

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sekolah	0	0,00%
2	SD	4	1,72%
3	SMP	3	1,29%
4	SMA	92	39,48%
5	Diploma 1	5	2,15%
6	Diploma 2	0	0,00%
7	Diploma 3	0	0,00%
8	S1	121	51,93%
9	S2	8	3,43%
10	S3	0	0,00%
Jumlah		233	100%

3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari jenis pekerjaan responden diketahui bahwa responden terbesar pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau memiliki pekerjaan dengan kategori "Lainnya" yaitu sebanyak 129 orang atau sebesar 55,36%.

Tabel 5
Jenis Pekerjaan Responden

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	PNS	24	10,30%
2	TNI	1	0,43%
3	POLRI	15	6,44%
4	Swasta	60	25,75%
5	Wirausaha	4	1,72%
6	Tenaga Kontrak	0	0,00%
7	Lainnya	129	55,36%
Jumlah		233	100%

3.1.3 Domisili Responden

Berdasarkan hasil survei terhadap 233 responden, diperoleh data bahwa mayoritas responden berasal dari Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebanyak 228 orang atau 97,85%.

Tabel 6
Domisili Responden

No.	Domisili	Frekuensi	Persentase
1	Sumatera Selatan	228	97,85%
2	Bengkulu	4	1,72%
3	DKI Jakarta	1	0,43%
Jumlah		233	100%

3.1.4 Kelompok Usia Responden

Jika dilihat dari usia responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun sebesar 26,18%, usia 40-49 tahun sebesar 25,75% dan usia 18-28 tahun sebesar 24,46%. Bagi kelompok usia di atas 60 tahun, jumlah responden semakin mengecil.

Tabel 7
Usia Responden

No.	Umur	Frekuensi	Persentase
1	18 - 28 Tahun	57	24,46%
2	29 - 39 Tahun	61	26,18%
3	40 - 49 Tahun	60	25,75%
4	50 - 59 Tahun	47	20,17%
5	60 - 69 Tahun	7	3,00%
6	Diatas 69 Tahun	1	0,43%
Jumlah		233	100%

3.1.5 Jenis Kelamin Responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa mayoritas pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 172 orang atau 73,82% dan pengguna layanan berjenis kelamin perempuan sebanyak 61 orang atau 26,18%.

Tabel 8
Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	172	73,82%
2	Perempuan	61	26,18%
Jumlah		233	100%

3.1.6 Layanan yang digunakan

Terkait dengan jenis layanan yang digunakan oleh responden, dari 233 responden sebesar 43,78% pada layanan Kepaniteraan Hukum / Informasi.

Tabel 9
Jenis Layanan yang dipergunakan Responden

No.	Jenis Layanan	Frekuensi	Persentase
1	Pidana	31	13,30%
2	Perdata	77	33,05%
3	Hukum / Informasi	102	43,78%
4	Administrasi Umum	22	9,44%
5	e-Court	1	0,43%
Jumlah		233	100%

3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

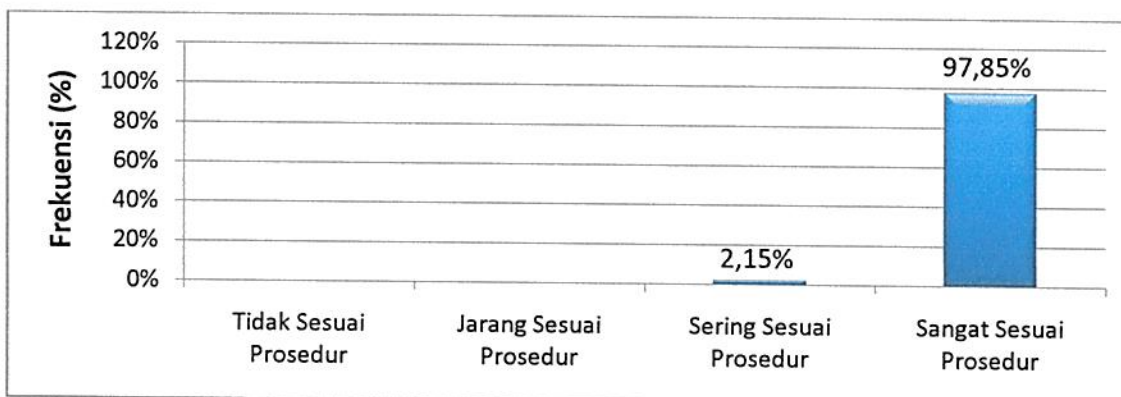
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,979 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 99,48. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi dalam bentuk manipulasi peraturan.

Tabel 10
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Sesuai Prosedur	1	-	-
2.	Jarang Sesuai Prosedur	2	-	-
3.	Sering Sesuai Prosedur	3	5	2,15%
4.	Sangat Sesuai Prosedur	4	228	97,85%
Jumlah			233	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 1
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,996 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 99,90. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih

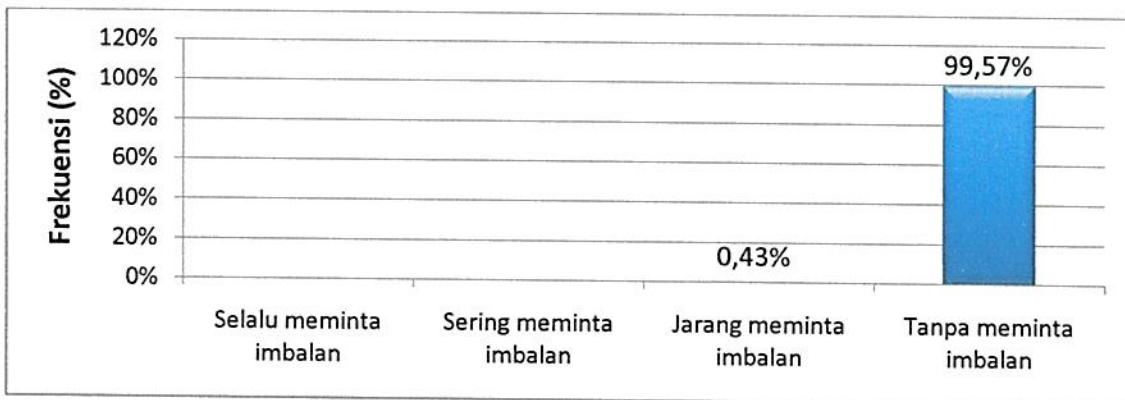
dari korupsi dalam bentuk Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 11
Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu meminta imbalan	1	-	-
2.	Sering meminta imbalan	2	-	-
3.	Jarang meminta imbalan	3	1	0,43%
4.	Tanpa meminta imbalan	4	232	99,57%
Jumlah			233	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 2
Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

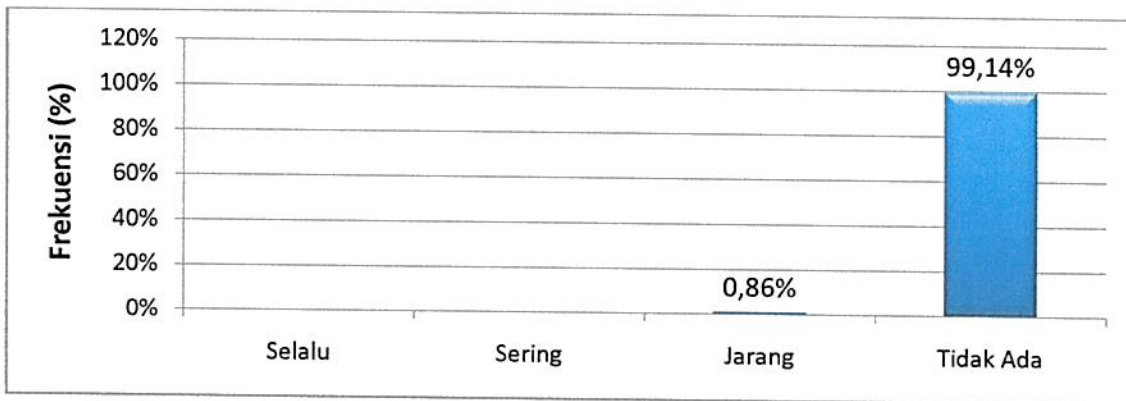
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,991 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 99,78. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi dalam bentuk menjual pengaruh.

Tabel 12
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	-	-
2.	Sering	2	-	-
3.	Jarang	3	2	0,86%
4.	Tidak Ada	4	231	99,14%
Jumlah			233	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 3
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

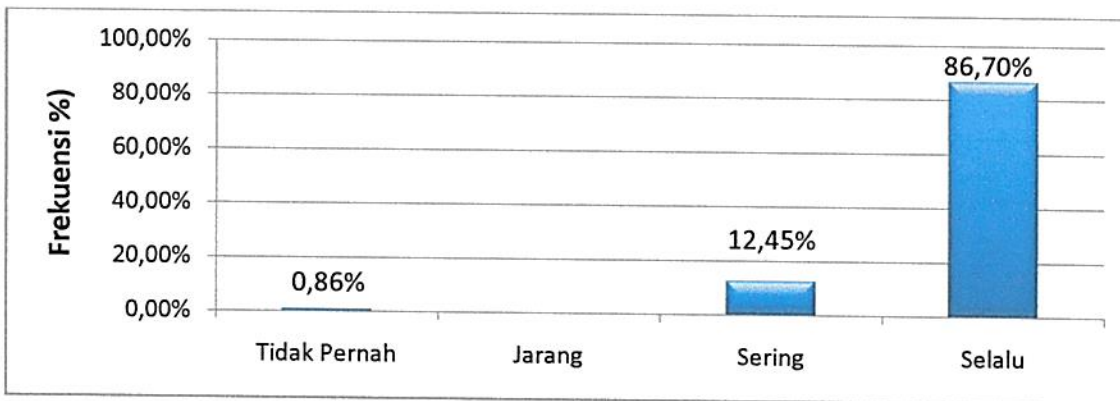
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,850 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 96,25. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi terkait dengan transaksi biaya.

Tabel 13
Indeks pada Indikator Transaksi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	1	2	0,86%
2.	Jarang	2	-	-
3.	Sering	3	29	12,45%
4.	Selalu	4	202	86,70%
Jumlah			233	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 4
Indeks pada Indikator Transaksi Biaya



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

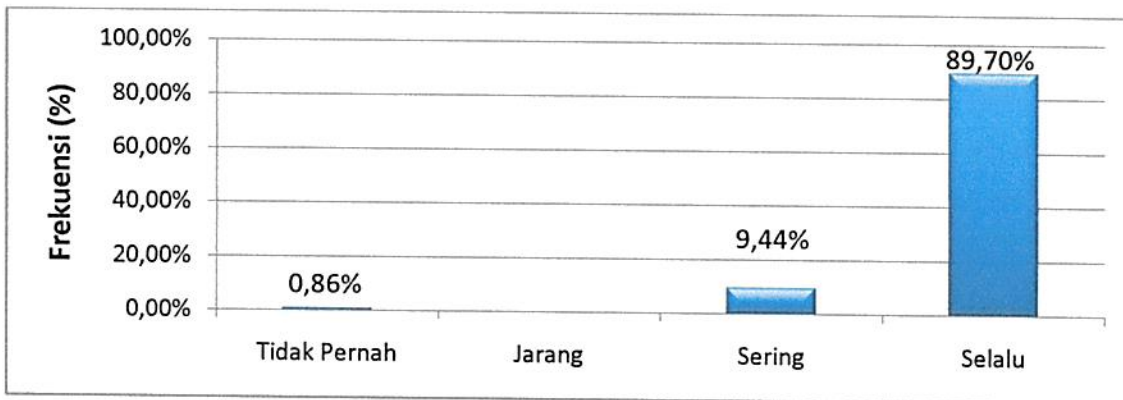
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,880 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 97,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi terkait dengan biaya tambahan.

Tabel 14
Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	1	2	0,86%
2.	Jarang	2	-	-
3.	Sering	3	22	9,44%
4.	Selalu	4	209	89,70%
Jumlah			233	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 5
Indeks pada Indikator Biaya Tambahan



3.2.6. Indikator Hadiah

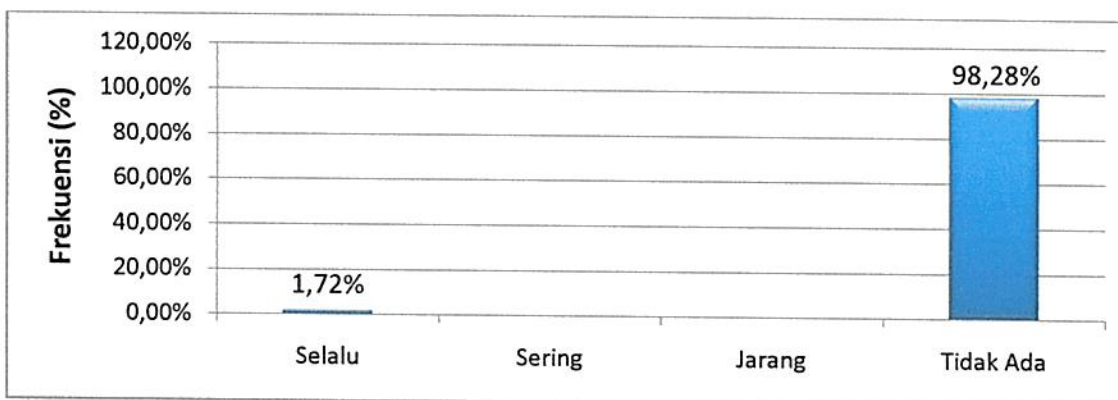
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,948 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 98,70. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi terkait dengan pemberian hadiah.

Tabel 15
Indeks pada Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	4	1,72%
2.	Sering	2	-	-
3.	Jarang	3	-	-
4.	Tidak Ada	4	229	98,28%
Jumlah			233	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 6
Indeks pada Indikator Hadiah



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

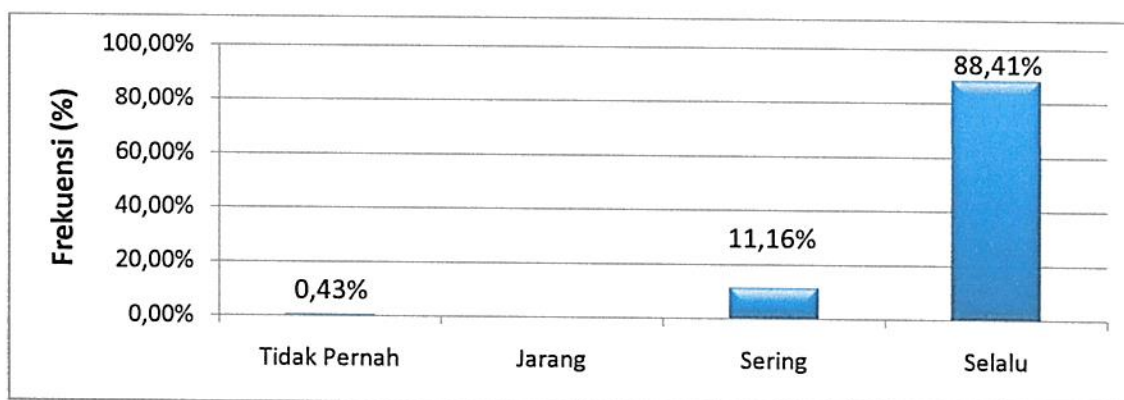
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,876 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 96,90. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi terkait dengan transparansi biaya.

Tabel 16
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Pernah	1	1	0,43%
2.	Jarang	2	-	-
3.	Sering	3	26	11,16%
4.	Selalu	4	206	88,41%
Jumlah			233	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 7
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya



3.2.8. Indikator Percaloan

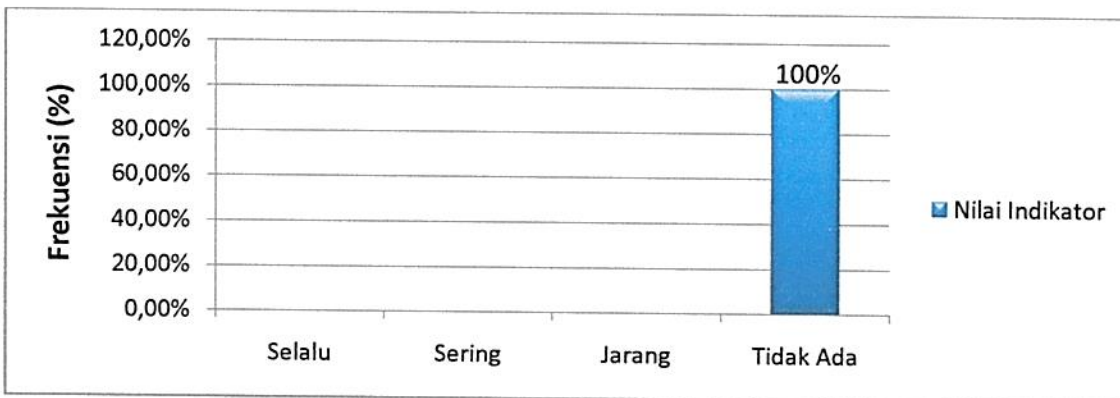
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 100,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi terkait dengan tindakan Percaloan.

Tabel 17
Indeks pada Indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	-	-
2.	Sering	2	-	-
3.	Jarang	3	-	-
4.	Tidak Ada	4	233	100%
Jumlah			233	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 8
Indeks pada Indikator Percaloan



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

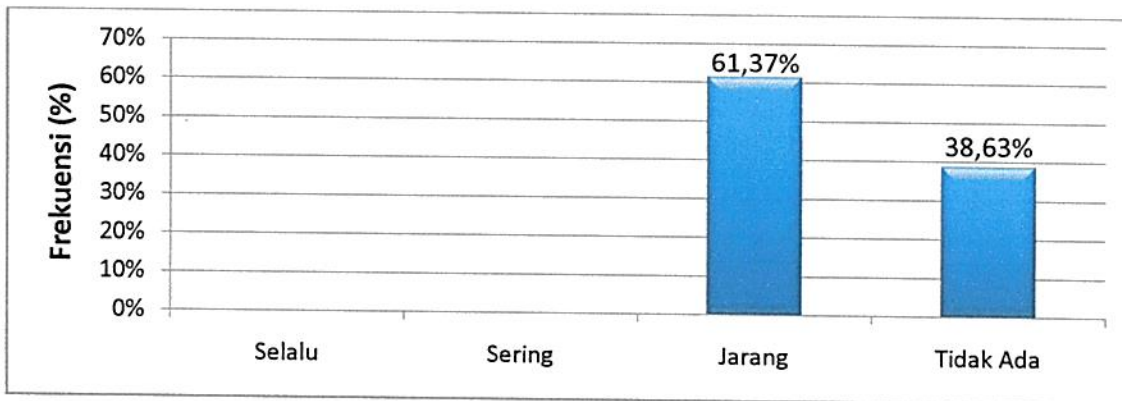
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,386 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 84,65. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi terkait dengan perbuatan curang.

Tabel 18
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	-	-
2.	Sering	2	-	-
3.	Jarang	3	143	61,37%
4.	Tidak Ada	4	90	38,63%
Jumlah			233	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 9
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang



3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

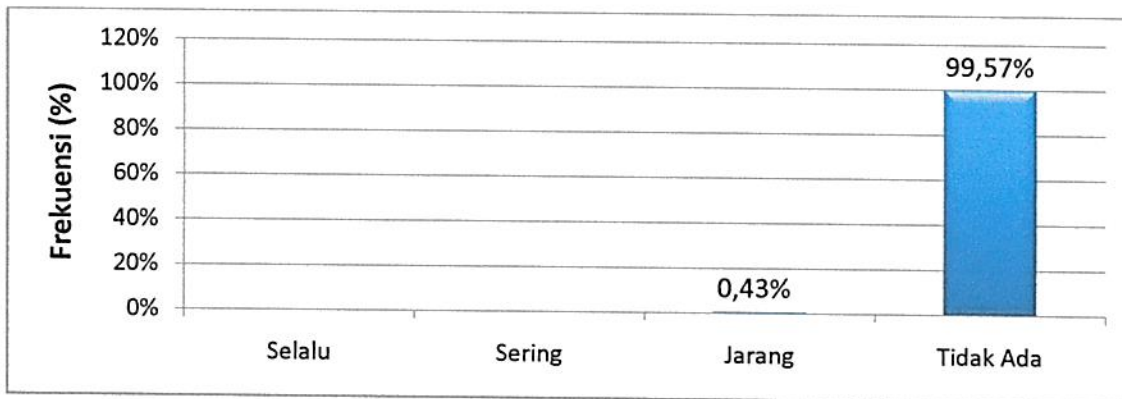
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,996 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 99,90. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari korupsi terkait dengan transaksi rahasia.

Tabel 19
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	-	-
2.	Sering	2	-	-
3.	Jarang	3	1	0,43%
4.	Tidak Ada	4	232	99,57%
Jumlah			233	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 10
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Berdasarkan hasil survei indeks persepsi korupsi pada 10 (sepuluh) indikator diatas, diperoleh nilai interval/nilai indeks masing-masing indikator sebagaimana dicantumkan pada tabel dibawah ini. Setelah dilakukan perhitungan terhadap nilai indeks tersebut diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau yaitu 3,89 atau 97,25.

Tabel 20
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IB

Ruang Lingkup	Indeks	Nilai Rata-rata Tertimbang
Manipulasi Peraturan	3,979	0,398
Penyalahgunaan Jabatan	3,996	0,400
Menjual Pengaruh	3,991	0,399
Transaksi Biaya	3,850	0,385
Biaya Tambahan	3,880	0,388
Hadiah	3,948	0,395
Transparansi Biaya	3,876	0,388
Percaloan	4,000	0,400
Perbuatan Curang	3,386	0,339
Transaksi Rahasia	3,996	0,400
INDEKS PERSEPSI KORUPSI		3,890

Indeks Persepsi Korupsi **3,890** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3,26 s.d 4,00.

Tabel 21
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IB

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Secara lengkap, skor Indeks Persepsi Korupsi dan peringkat masing-masing Indikator pada Triwulan III Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 22
Skor dan Peringkat Persepsi Korupsi pada
Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IB
Triwulan III Tahun 2021

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor		Kategori	Peringkat
		Skala 100	Skala 1-4		
1	Manipulasi Peraturan	99,48	3,979	Bersih dari Korupsi	4
2	Penyalahgunaan Jabatan	99,90	3,996	Bersih dari Korupsi	2
3	Menjual Pengaruh	99,78	3,991	Bersih dari Korupsi	3
4	Transaksi Biaya	96,25	3,850	Bersih dari Korupsi	8
5	Biaya Tambahan	97,00	3,880	Bersih dari Korupsi	6
6	Hadiah	98,70	3,948	Bersih dari Korupsi	5
7	Transparansi Biaya	96,90	3,876	Bersih dari Korupsi	7
8	Percaloan	100,00	4,000	Bersih dari Korupsi	1
9	Perbuatan Curang	84,65	3,386	Bersih dari Korupsi	9
10	Transaksi Rahasia	99,90	3,996	Bersih dari Korupsi	2

3.4. Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 23

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B**

No.	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau
1	Sangat bagus, cepat, dan cepat membantu
2	Pelayanannya sangat bagus
3	Pelayanannya sangat ramah dan cepat
4	Terimakasih telah melayani dengan baik
5	Pelayanan yang diberikan sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang ada

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,89** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,979.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,996.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,991.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,850
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,880.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,948.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,876.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,386.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,996.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IB Triwulan III Tahun 2021 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Perbuatan Curang memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya dengan nilai 3,386 sehingga perlu ditingkatkan pada indikator tersebut untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi.

Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan pengawasan melalui cctv dan inspeksi

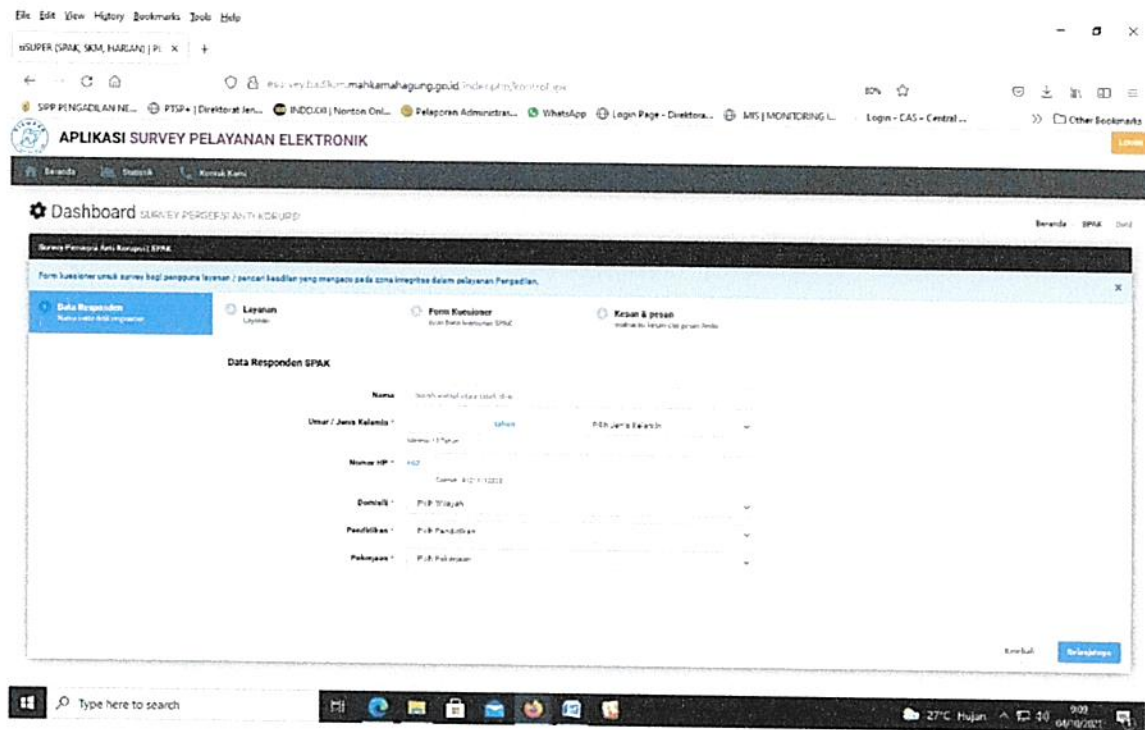
mendadak/sidak terhadap petugas-petugas pelayanan agar tidak melakukan hal-hal yang menyalahi aturan.

- Agar setiap pembayaran produk layanan selalu diberikan tanda bukti pembayaran / kwitansi kepada masyarakat.
- Menggalakkan *Audio Public Campaign* di Lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

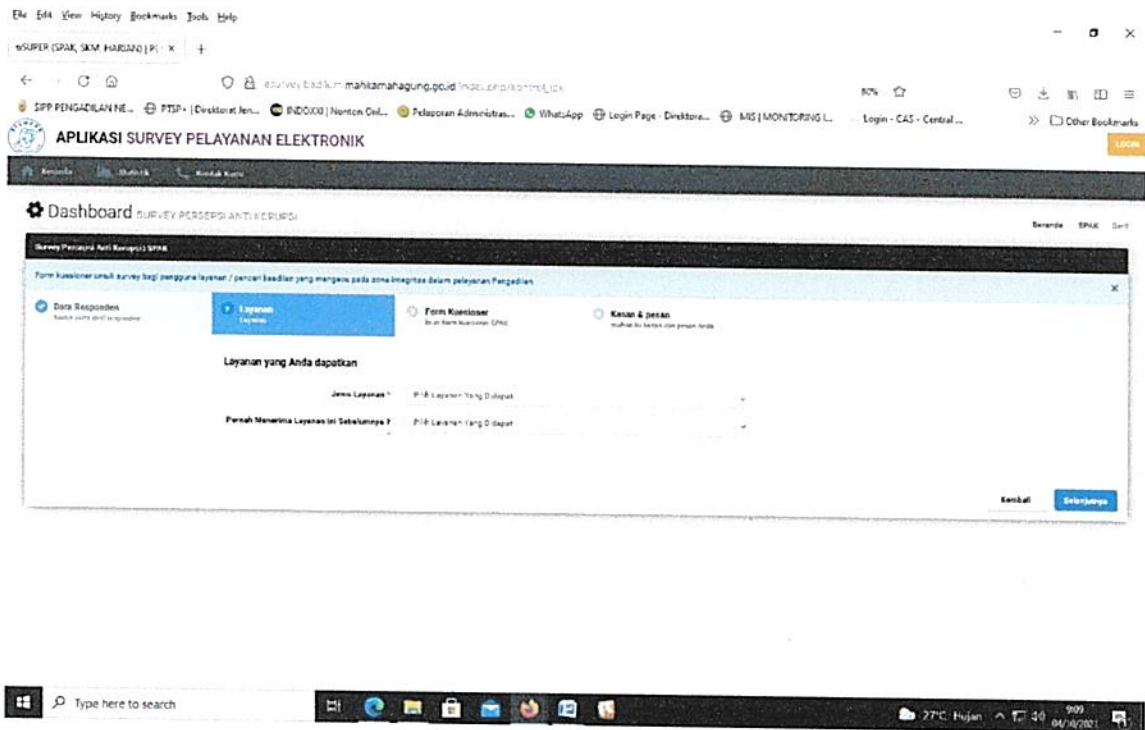
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan / Kuesioner pada Aplikasi Survei Elektronik (SISUPER)

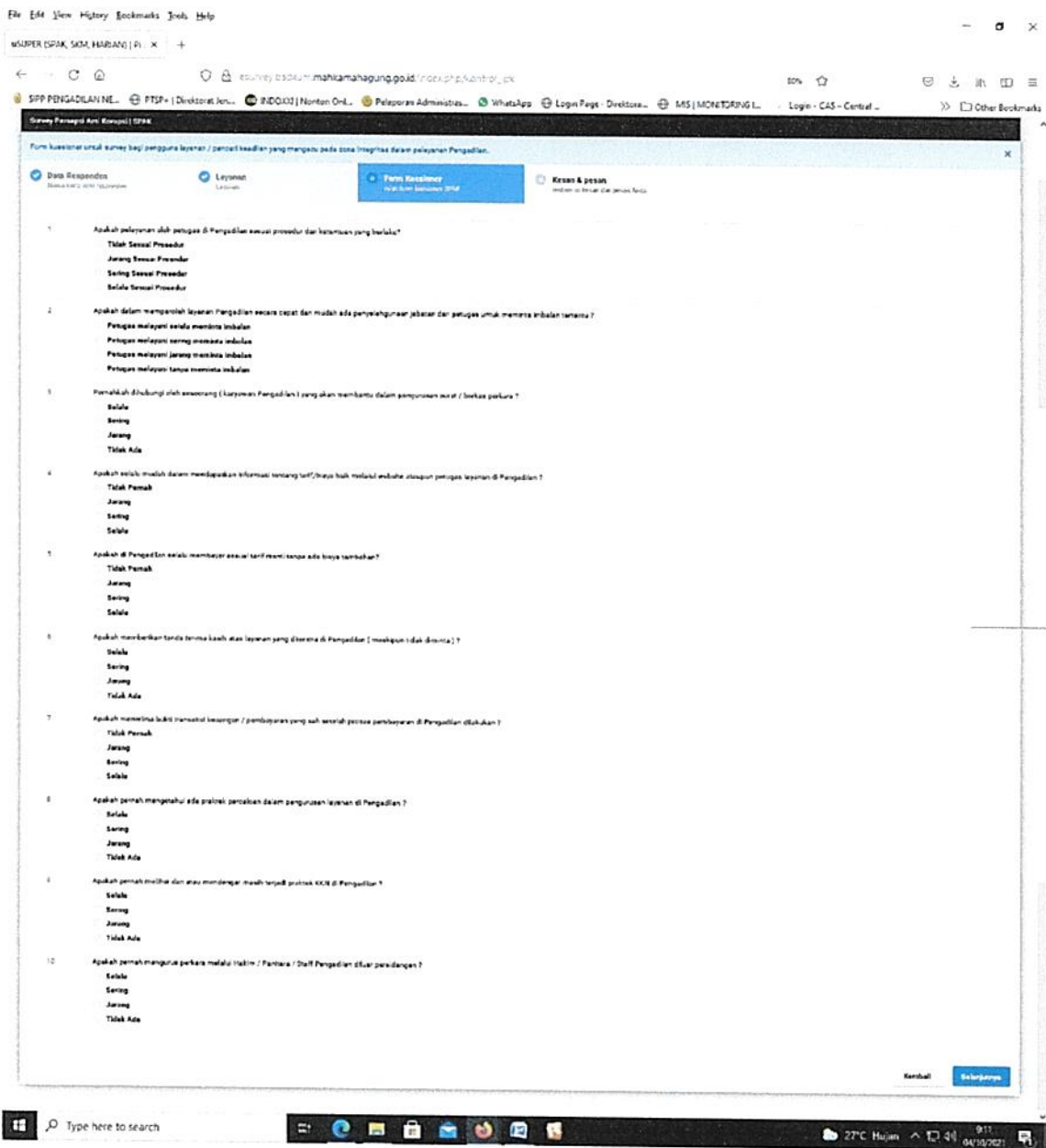
1. Data Responden



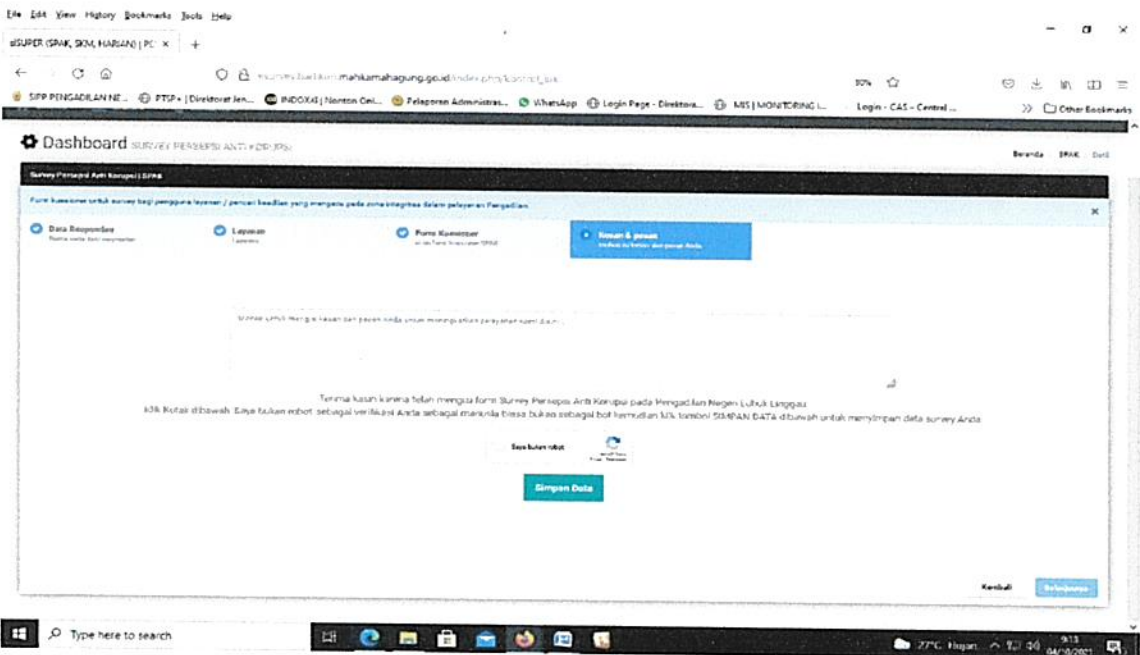
2. Layanan yang Digunakan



3. Form Kuesioner



4. Kesan dan Pesan



DOKUMENTASI

Pengisian Kuesioner Survei



**PERHITUNGAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS IB
PERIODE JULI - SEPTEMBER 2021**

No. Responden	UNSUR-UNSUR PERTANYAAN										Keterangan
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
17	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	

76	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
77	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	
78	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
87	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	
88	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
89	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
99	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
100	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
101	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	
102	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	
103	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
104	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
106	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4
107	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	
108	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
109	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	
110	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
111	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
112	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
113	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
114	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
115	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
116	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
117	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
118	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
119	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
120	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
123	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
124	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
125	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
128	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
129	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
130	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
131	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
134	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
135	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
136	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
137	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
138	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
139	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
140	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
141	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
142	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
143	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
144	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
145	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
147	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	
148	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
149	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
150	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
151	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
152	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
153	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
154	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
155	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
156	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
157	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	
158	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	

159	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	
160	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	
161	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	
162	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	
163	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	
164	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	
165	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	
166	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	
167	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	
168	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	
169	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	
170	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	
171	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	
172	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	
173	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	
174	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	
175	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	
176	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
177	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
178	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
179	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
180	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
181	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
182	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
183	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	
184	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	
185	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
186	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	
187	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
188	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
189	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
190	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
191	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
192	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
193	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
194	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
195	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
196	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
197	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
198	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
199	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
201	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
202	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
203	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
204	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
205	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
206	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
207	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
208	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
209	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
210	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
211	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
212	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
213	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
214	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
215	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
216	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
217	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
218	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
219	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
220	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
221	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
222	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
223	4	4	4	3	1	4	3	4	3	4	
224	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	
225	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
226	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
227	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
228	4	4	4	1	1	1	4	4	4	4	
229	4	4	3	4	4	1	4	4	4	4	
230	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
231	4	4	4	1	4	1	4	4	3	4	
232	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
233	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
Jumah	927	931	930	897	904	920	903	932	789	931	
NRR per RL	3,979	3,996	3,991	3,850	3,880	3,948	3,876	4,000	3,386	3,996	38,901
NRR Tertimbang	0,398	0,400	0,399	0,385	0,388	0,395	0,388	0,400	0,339	0,400	3,890 *)
IPK Unit Pelayanan											97,25 **)

Keterangan:

Q1-Q10	=	Unsur-unsur Pelayanan
RL	=	Indikator Kriteria Korupsi
NRR	=	Nilai Rata-rata
IPK	=	Indeks Persepsi Korupsi
*)	=	Jumlah NRR IPK Tertimbang
**)	=	Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR per RL	=	Jumlah nilai per ruang lingkup layanan dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
NRR Tertimbang	=	NRR per ruang lingkup layanan x (1/10)
Jumlah Responden	=	100

Nilai Interval IPK	Nilai Interval	Mutu	Kinerja
1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	4	Bersih dari korupsi

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Peraturan	3,979
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	3,996
Q 3	Menjual Pengaruh	3,991
Q 4	Transaksi Biaya	3,850
Q 5	Biaya Tambahan	3,880
Q 6	Hadiah	3,948
Q 7	Tranparansi Biaya	3,876
Q 8	Percaloan	4,000
Q 9	Perbuatan Curang	3,386
Q 10	Transaksi Rahasia	3,996
NILAI IPK		3,890